

BAB I

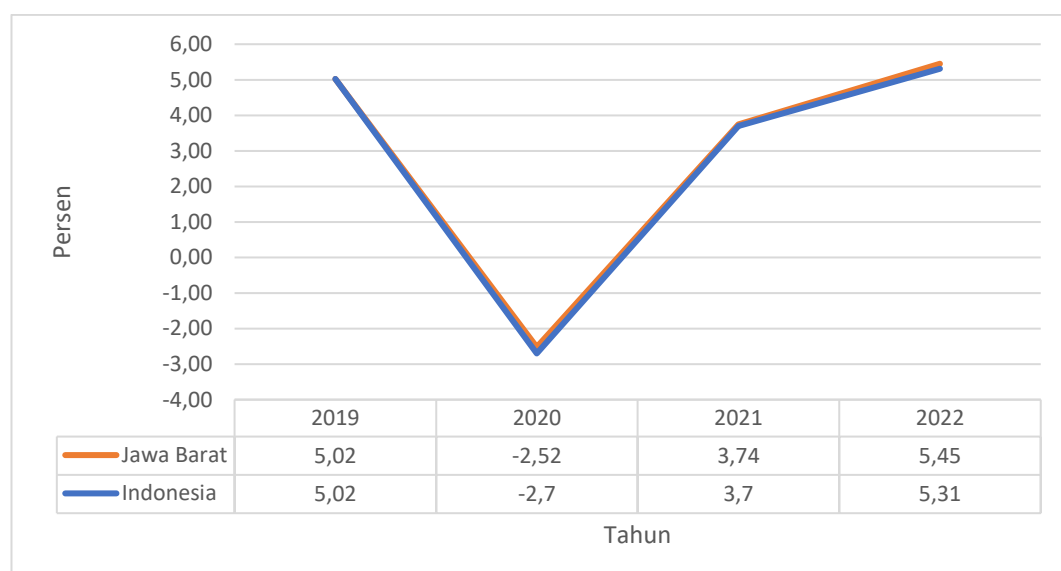
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat capaian keberhasilan suatu pembangunan negara (Fitri & Hasdi 2019). Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan selalu diupayakan dan diusahakan oleh setiap negara. Terlebih lagi pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di suatu wilayah merupakan proses yang bersifat *multidimensional* yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semestinya dapat diukur dengan membandingkan misalnya untuk ukuran provinsi dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya dan juga dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi (Adha Pohan & Yuliana, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi

keberlangsungan ekonomi di Indonesia atau suatu negara, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya dapat mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Saat ini di hampir setiap negara, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 (Persen)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kurun waktu 2019 sampai 2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan. Saat covid-19 melanda dunia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ikut dipengaruhi hingga mencapai pertumbuhan yang negatif. Hal itu disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan pajak. Selain itu, pemerintah lebih menekankan kepada fasilitas kesehatan dibandingkan dengan belanja daerah maupun infrastruktur lainnya.

Sebaliknya, berbeda dengan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya situasi global seperti menurunnya covid-19, adanya perubahan kebijakan pemerintah, peningkatan investasi dan infrastruktur, serta konsumsi masyarakat yang mulai meningkat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara/daerah salah satu caranya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara/daerah dengan melihat persentasi pertambahan pendapatan nasional riil (Budi et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah terlihat dari meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB ADHK pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama empat tahun terakhir tidak jauh berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada tahun 2020 provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang tidak terlalu tajam jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 kondisi pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan karena adanya peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah pengelolaan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

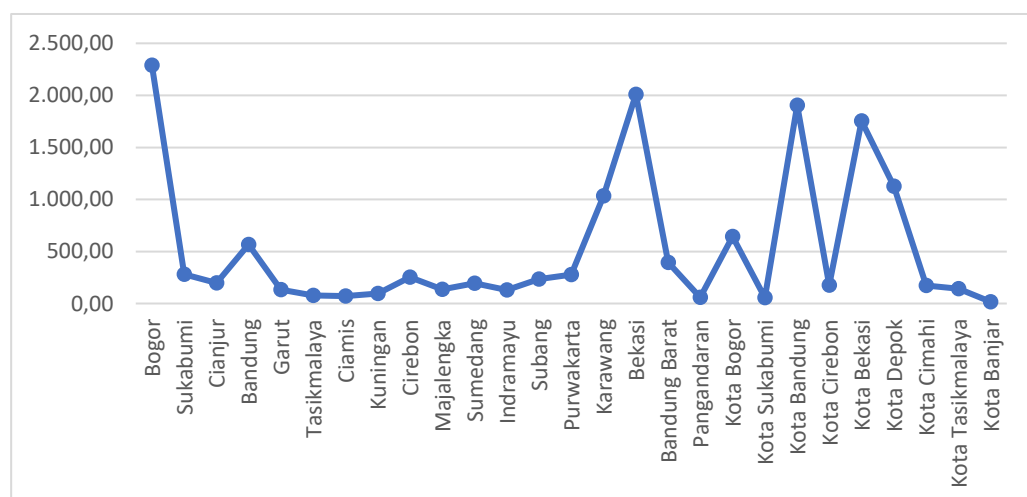
terutama berkaitan dengan PAD, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Idris dalam (Budi et al., 2021) ketentuan peraturan/perundang-undangan ditegaskan, bahwa penerimaan pendapatan tidak boleh memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama periode tahun 2019-2021 pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia relatif beragam. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK pada tiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB Jawa Barat berada di urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, disusul dengan Jawa Tengah dan Sumatera Utara sebagai urutan ke empat dan lima. Walaupun Jawa Barat berada pada posisi ketiga tetapi masih ada beberapa daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi jauh tertinggal di bawah rata-ratanya. Daerah yang memiliki ketertinggalan jauh terhadap daerah yang lainnya mengharuskan adanya suatu usaha yang lebih lagi dalam melakukan berbagai upaya peningkatan dan kualitas terhadap daerahnya untuk bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonominya, baik dari pemerintah daerahnya sendiri dan pemerintah pusat untuk ikut membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Adanya keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dengan berbagai teori. Teori Keynes mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan output dalam perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat sedangkan pemungutan pajak oleh pemerintah dapat berdampak negatif (Amri, 2020). Teori Peacock dan Wiseman juga didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar

pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Viera Valencia, 2019).

Adapun yang menjadi instrumen meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah itu sendiri, dimana pajak daerah memberikan sumbangan terbesar. Sebagai instrument penerimaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, naik turunnya pajak daerah disebabkan oleh aktivitas konsumsi masyarakat dari pajak yang bersifat konsumtif, pengaruh dari dana tranfers pusat kepada pemerintah daerah, serta adanya kebijakan dan kinerja dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan perundang-undangan.



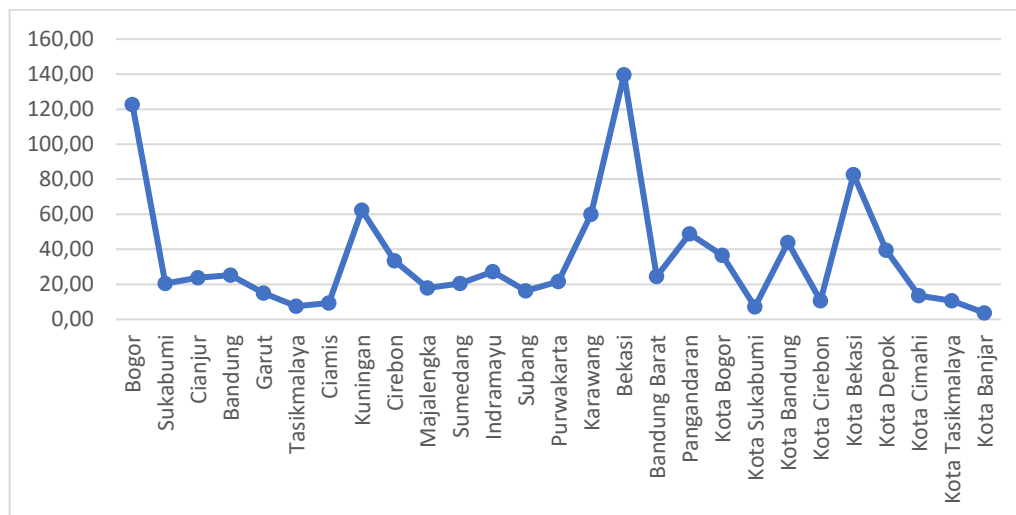
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gambar 1.2 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 (Miliar)

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber PAD (Pendapatan

Asli Daerah) adalah pajak daerah. Dalam pemungutannya, pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setiap daerah tentunya memiliki pendapatan dari pajak daerah dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari kondisi wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan adanya beberapa sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah, seperti dari sektor hiburan, restoran, hotel, bangunan, dan kendaraan. Disamping itu sektor industri juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan di suatu wilayah. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan PDRB. Peningkatan penerimaan pendapatan pajak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika nilai investor, konsumsi, dan neto ekspor minimal tetap. Pendapatan pemerintah dari pajak daerah ini dapat membantu membiayai pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak daerah memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Namun, disatu sisi jika pendapatan pajak di suatu daerah dinaikan tanpa adanya tingkat konsumsi yang tetap dan pendapatan yang rendah maka hal ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terkait dengan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Amri (2020) dan Miswar et al. (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulana &

Susilowati (2020) dan Bahari & SBM (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

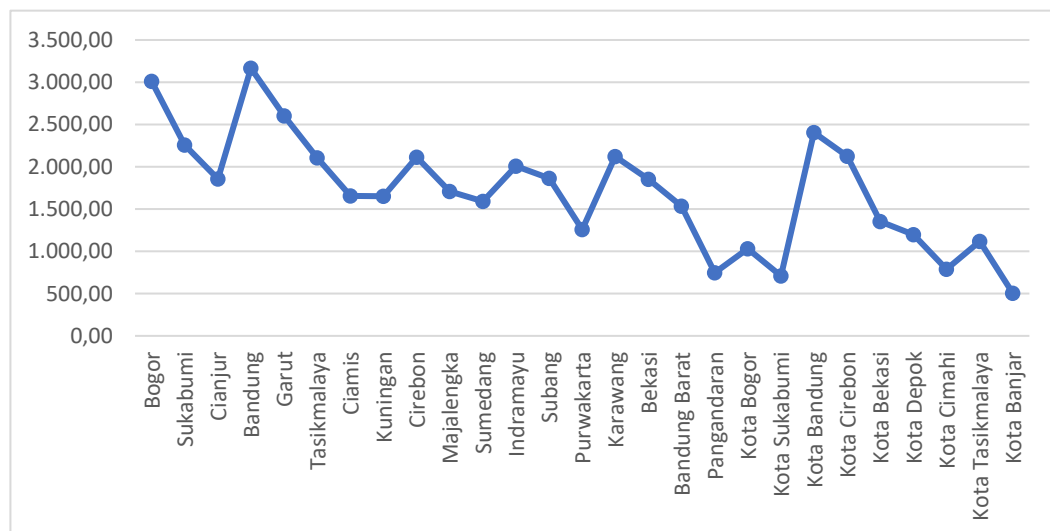


Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gambar 1.3 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 (Miliar)

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting bagian dari pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi daerah sebagai tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk membiayai program-program dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah juga dapat mempengaruhi kemandirian suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi ini yang menjadi bentuk kontribusi secara langsung masyarakat setempat untuk mendukung proses ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Pendapatan dari retribusi sama halnya dengan pajak daerah dimana itu tergantung keadaan fasilitas dan kualitas layanan di suatu wilayah. Layanan yang efisien dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun, disatu sisi

pengaruh retribusi daerah tidak selalu positif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dampaknya meliputi tarif retribusi, efisiensi pengelolaan, dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa retribusi dikelola dengan baik dan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian terkait dengan retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Miswar et al. (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.



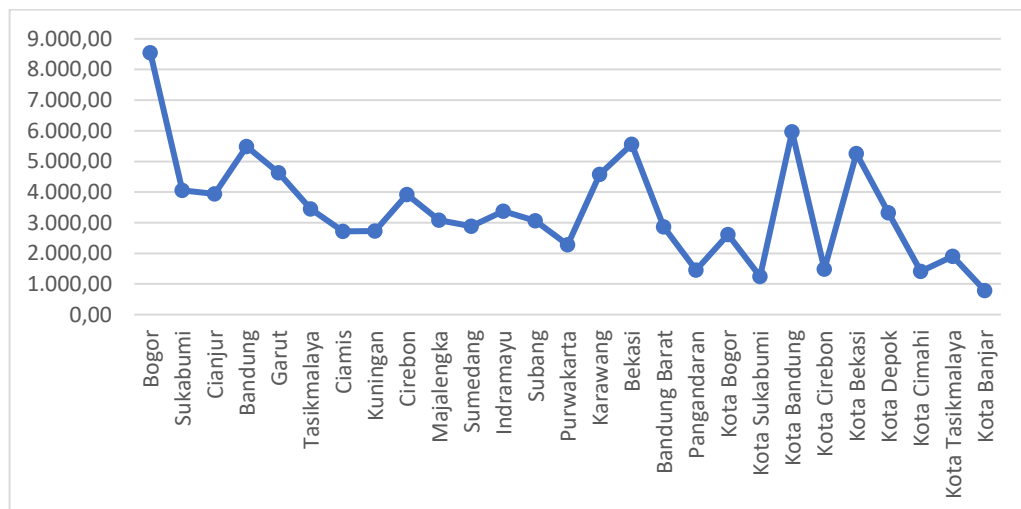
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 1.4 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Miliar)

Di era otonomi ini diharapkan tiap daerah menjadikan daerahnya yang mandiri dalam pengelolaan keuangannya yang ditandai dengan bagaimana efektivitas pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran di daerah tersebut. Disamping itu untuk masalah beberapa hal lainnya seperti kekurangan

dana, pemerintah pusat memberikan bantuan dana kepada tiap daerah, dimana dana tersebut yang dinamakan dengan dana perimbangan. Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan dana pada tiap daerah tidak merata, sehingga kabupaten/kota yang kecil mendapatkan bantuan dana yang cukup kecil juga. Sehingga untuk melakukan perkembangan suatu daerah itu masih terbatas dikarenakan dana yang ada masih belum mencukupi. Dana perimbangan berbeda-beda tiap daerah karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan yang lain. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk populasi, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur. Pembagian dana tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, dana perimbangan memainkan peran yang kompleks dalam mengatur ketimpangan pendapatan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang efisien dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian terkait dengan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Anggraeni & Rochmatullah (2024) dana perimbangan memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga penelitian dari Ichsan & Anistia (2022). Namun, penelitian dari Ningsih & Noviaty (2019) dana perimbangan memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gambar 1.5 Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 (Miliar)

Penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah belanja daerah. belanja daerah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Belanja daerah dapat diartikan sebagai pengeluaran atau investasi untuk memperoleh barang modal sehingga belanja daerah disebut juga sebagai investasi atau penanaman modal dalam jangka panjang. Belanja daerah pada tiap daerah juga berbeda tentunya, hal ini disebabkan karena besar kecilnya belanja daerah di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana apabila faktor tersebut di kelola dengan baik maka akan meningkatkan belanja daerah dan apabila belanja daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik.

Penelitian terkait dengan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai contoh yang telah dilakukan oleh Jannah et al. (2022) belanja daerah memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) belanja daerah memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa peneliti di atas, masih terdapat "*empirical gap*" untuk penelitian lebih lanjut karena hasilnya yang berbeda-beda. Sehingga masih diperlukan adanya penelitian lanjutan bagaimana pengaruh baik pendapatan maupun pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks perekonomian regional Indonesia, penelitian ini menguji kembali terkait beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sangat relevan mengingat fakta bahwa perkembangan ekonomi regional sangat bervariasi di seluruh daerah, dan bahwa realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah juga bervariasi dalam periode waktu yang sama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dengan judul **"PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 - 2022"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 - 2022?
2. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 - 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai media pemahaman dalam pengembangan ilmu mengenai kebijakan fiskal, khususnya tentang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil

penelitian ini kemudian dapat dijadikan sebagai perbandingan dan referensi yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi Peneliti

Dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan selama kuliah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan beserta pemahaman mengenai pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan dan mengefektifkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

c. Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat digunakan sebagai bahan informasi serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia dalam keuangan daerah.

